

Analisis Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Uang Perjalanan Dinas di Setdakab Nagan Raya

Dina Fitriansyah¹, Ika Rahmadani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 13 Oktober 2022
Revised: 05 Januari 2023
Accepted: 06 Januari 2023

KEYWORDS

Official travel, The accounting System the Budget, Effective and Efficient

CORRESPONDENCE

E-mail: DinaFitriansyah16@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the Accountability of Business Travel money in SETDAKAB Nagan Raya and whether it has been prepared by Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.05/2008 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Finance Number 45/PMK. 05/2007, which contains official domestic travel for state officials, civil servants, and non-permanent employees. The research method used in this research is a descriptive qualitative method by observing work practices at research locations to obtain primary and secondary data. The data was recorded and collected using interview techniques with Expenditure Treasurers, Assistant Treasurers, and SPPD operators to see the mechanism of the administration process for official travel money accountability. The results of this study also show that the budget for travel in the Nagan Raya region from 2018 to 2020 has experienced an increase in funding, and in 2021 there was a decrease in the budget due to budget cuts. The budget has been allocated to help residents affected by the pandemic. It has been effective and efficient in carrying out the payment of official travel money at SETDAKAB Nagan Raya.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 mengenai proses Keuangan Daerah merupakan keperluan dari perencanaan, pembiayaan, penyelenggaraan, pemberitaan, kewajiban, & pemantauan belanja daerah. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan perubahan keduanya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memuat paduan pengaturan keuangan daerah, mengamanatkan bahwa Menteri dalam Negeri melaksanakan pengukuhan & pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pemerintah Daerah meliputi pemberian dokumen sistem formalitas pengaturan keuangan daerah. Penyelenggaraan Permendagri mengeluarkan Surat Edaran No. SE /900/316/BAKD mengenai paduan sistem & formalitas penatausahaan akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah. Sejalannya periode, beserta adanya peralihan dinamika ekonomi pengelolaan keuangan daerah yang makin rumit, sehingga aturan ini diubah lagi menjadi Permendagri Nomor 77 tahun 2010 yang memuat paduan Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, serta mengungkapkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 ditarik dan sudah tidak berfungsi (Said & Latif, 2020).

Perjalanan dinas dilaksanakan untuk menghadiri seminar, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan jabatan atau tugas karyawan/ pegawai yang melaksanakan kegiatan kantor. Kegiatan rapat atau seminar yang dihadiri bermanfaat untuk karyawan/ pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas karena bisa menambah wawasan baru yang didapatkan dari seminar atau rapat yang diikuti tersebut berguna untuk kemajuan bagi suatu instansi/ lembaga. Untuk menunjang terselenggaranya perjalanan dinas, diantaranya berupa transportasi yang diperlukan untuk menuju tempat pelaksanaan perjalanan dinas, dan juga pengeluarannya berupa biaya sebagai penunjang kebutuhan selama perjalanan dinas (Susanto, 2021, hal. 26) .

Berdasarkan PERPRES NO. 54 Tahun 2022 tentang perubahan postur dan rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022. Pemerintah menangani COVID -19 dengan mengelola anggaran sebaik mungkin. Dengan demikian, pemerintah melaksanakan pemotongan anggaran untuk berbagai kegiatan dan biaya disalurkan agar menolong masyarakat yang terdampak COVID- 19. Pemangkasan biaya ini pastinya berakibat atas kegiatan operasional kantor / instansi. Banyak aktivitas yang diberhentikan yaitu aktivitas-aktivitas yang dianggap bukan lagi signifikan / bukan dalam koridor utama yang berhubungan dengan pengendalian pandemi ditanggguhkan salah satunya Perjalanan Dinas (Astiti, 2020, hal. 1).

Hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Slamet (2021), Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Uang Perjalanan Dinas Di Inspektorat IV Itjen Kemendribudristek RI. Hasil dari penelitian sebelumnya yaitu dalam proses dan langkah-langkah penyimpanan bukti perjalanan dinas yang tidak bagus, memungkinkan terjadinya masalah kerusakan & waktu hilangnya bukti perjalanan dinas, serta tempo penyusunan informasi hasil perjalanan dinas lambat untuk ditindaklanjuti. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran perjalanan di Setdakab Nagan Raya dari tahun 2018 - 2020 mengalami kenaikan dan di tahun 2021 terjadinya penurunan anggaran karena terjadinya pemangkasan anggaran dan anggaran tersebut dialokasikan agar menolong penduduk yang terkena pandemi. Dalam pelaksanaan pembayaran uang perjalanan dinas di SETDAKAB Nagan Raya sudah efektif dan efisien dengan mengikuti pedoman yang berlaku /ditetapkan.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui penerapan sistem pembayaran pengelolaan uang perjalanan dinas di Kantor Bupati Lingkup SETDAKAB Nagan Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku di kantor tersebut, Untuk mengetahui Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, Untuk mengetahui proses pencairan SPPD, dan Untuk mengetahui mekanisme pembayaran perjalanan dinas di SETDAKAB Nagan Raya.

Pada penyelenggaraanya, didapat masalah mengenai pergi & pulangnya pejabat negara/pegawai/pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas. Masalah itu meliputi bukan pergi dari tempat kedudukan, kembali bukan ke tempat kedudukan semula, dan lebih parah yaitu pergi & pulang bukan dari tempat & ke tempat kedudukan sebaiknya sikron dengan surat perintah perjalanan dinas. Permasalahan yang lainnya adalah mengenai kecurangan melakukan perjalanan dinas, contohnya berangkat 2 orang tapi membawa SPT(Surat Perintah Tugas) 4 orang. Jadi, dalam pelaksanaannya diseting seakan-akan semuanya berangkat melakukan perjalanan dinas tersebut.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perjalanan Dinas

Berdasarkan pendapat Sugiyanto (2013) Surat Perjalanan Dinas merupakan surat keterangan yang berisi tentang penugasan pegawai/pegawai tidak tetap di suatu instansi, untuk bertugas ke suatu tempat dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Perjalanan dinas sebagaimana tertuang di peraturan menteri keuangan No. 07 /PMK. 05 / 2008 mengenai aturan selanjutnya dari menteri keuangan No. 45 / PMK, 07/2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri untuk pejabat negara, pegawai negeri, & pegawai tidak tetap merupakan perjalanan dinas melalui kota/ di dalam kota dari tempat tinggal asli di negara yang dilakukan di dalam wilayah RI (Sudirman, 2021, hal. 3).

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan serangkaian tata cara yang digunakan untuk mengatur pendapatan, pengeluaran & kegiatan keuangan lainnya dari suatu institusi, yang bertujuan membukukan transaksi keuangan, merangkum transaksi tertera & bisa menyusun laporan keuangan yang komprehensif & bisa difungsikan bagi pengambilan ketentuan untuk meninjau, mengkaji & meningkatkan kemampuan operasional . Mulyadi (2001:03) mengartikan sistem akuntansi sebagai organisasi, formulir, catatan dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk, mengelompokkan, menganalisis, meringkas, memahami, dan menyajikan data keuangan secara akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan oleh manajemen (Susanto, 2021, hal. 3).

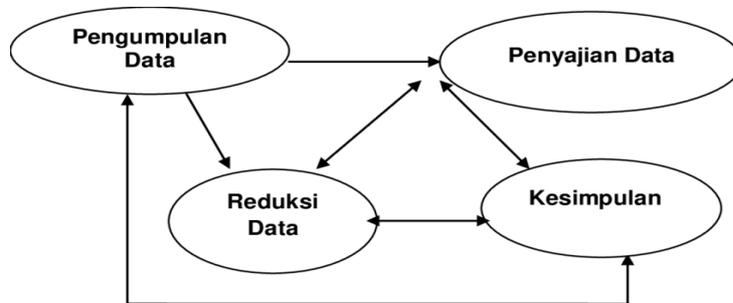
Sistem Informasi Akuntansi

Pendapat Romney dan Steinbart SIA merupakan suatu prosedur yang menghimpun, menyusun, menaungi, & mengatur data untuk mendapatkan laporan untuk pengambilan kebijakan (Susanto, 2021, hal. 3). Menurut Azhar Susanto (2013:72) “Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan atau grup dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan” (Sularto, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan dilaksanakan memakai pendekatan kualitatif deskriptif, dilaksanakan di kantor Bupati Nagan Raya Lingkup Setdakab Nagan Raya Jalan Poros Utama Lueng Baroe Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Observasi dilaksanakan mulai dari bulan Januari - Mei tahun 2022. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan operator bagian Bendahara Pengeluaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari kegiatan wawancara dan observasi, sedangkan, data sekunder didapat dari sumber yang sudah terdokumentasi di SETDAKAB Nagan Raya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman yang sudah diperoleh pada Khasanah et.al (2020) dalam menganalisis data kualitatif dilakukan dengan beberapa langkah berikut, yakni mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan menyimpulkan data.

1. Pengumpulan data, pengumpulan data dilaksanakan beberapa langkah, teknik pertama observasi, kedua wawancara, dan yang ketiga dengan teknik dokumentasi.
2. Reduksi data, berarti memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
3. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, diagram, flowchart, dan sejenisnya.
4. Kesimpulan, kumpulan data dari pengumpulan data, reduksi data dan penyajian, sehingga dari tahap-tahap tersebut menghasilkan data mudah dipahami oleh pembaca dan penulis.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kaloh (2009), kepada daerah sebagai pemimpin organisasi administrasi pemerintah daerah diharuskan untuk dapat bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas guna membangkitkan semangat bekerja para bawahannya. Daerah yang menerima Otonomi hanya Aceh dan Papua, yang berarti kedua daerah ini memiliki keistimewaan bahwa dana otonomi dalam struktur pendapatannya sebagai hasil dari penerimaan bagi hasil alam yang lebih besar terutama pada sektor minyak dan gas yang diberikan ke provinsi.

Pemerintah daerah menghadapi tekanan yang besar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Terdapat dua lembaga yang penting dalam pemerintah daerah yaitu DPRD dan perangkat daerah yang berbasis tentang peraturan daerah. Untuk mengaplikasikan suatu kebijakan tidaklah mudah, Hogerwerf dalam wahab (2004) mengatakan untuk dapat mensukseskan kebijakan pemerintah dibutuhkan implementasi yang baik. Implementasi disini berarti upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber-sumber yang dipilih.

Akuntabilitas Keuangan di Pemerintah Daerah

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah demi menyejahterakan masyarakat secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan. Kualitas Pemerintahan Daerah yang baik bukan hanya ditentukan oleh akuntabilitas, namun kualitas pemerintah yang baik juga ditentukan oleh faktor lain seperti *responsiveness, consensus orientation, equity efficiency, effectiveness dan strategic vision*.

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003), akuntabilitas dapat dikatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan. Osborne (1992) dalam Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, dimana, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.

Akuntabilitas terdiri atas pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga mereka dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan tidak hanya pada aspek aktivitas finansialnya saja. Dalam Hartati (2008) Sinclair (1995) mengatakan ada lima bentuk dari akuntabilitas yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas publik, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas profesional dan akuntabilitas. Penelitian Soleman (2007) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan terhadap perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan Sistem Akuntansi perjalanan dinas di SETDAKAB Nagan Raya khususnya dalam penyusunan Surat Perintah Perjalanan Dinas masih sederhana, yaitu hanya menggunakan Microsoft Office. Dalam hal pengelolaan pengeluaran uang perjalanan dinas di SETDAKAB Nagan Raya sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang di kantor tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa anggaran perjalanan di SETDAKAB Nagan Raya mulai Tahun 2018- 2020 mengalami kenaikan anggaran dan di tahun 2021 terjadinya penurunan anggaran karena terjadinya pemangkasan anggaran dan anggaran tersebut dialokasikan untuk masyarakat yang terdampak COVID -19. Terkait pembayaran biaya perjalanan dinas SETDKAB Nagan raya dilakukan dengan melalui Cash Management System (CMS) yaitu via transfer. Dalam pelaksanaan pembayaran uang perjalanan dinas di SETDAKAB Nagan Raya sudah efektif dan efisien dengan mengikuti pedoman yang berlaku /ditetapkan. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah lebih banyak lagi referensi supaya dapat memperluas pemahaman tentang pertanggungjawaban dan pengelolaan uang perjalanan dinas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan YME atas berkat hikmat & karunia- Nya peneliti bisa menuntaskan penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Uang Perjalanan Dinas Di SETDAKAB Nagan Raya”. Penulis sangat berterimakasih pada seluruh pihak yang sudah menyokong dalam penyusunan penelitian ini yang istimewa Bendahara Pengeluaran, dosen pembimbing, Pengeluaran dan seluruh staf-staf yang ada di bagian Bendahara Pengeluaran.

REFERENSI

- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Review Akuntansi Dan Keuangan*. Volume 1. No 1. Hal 21-37. Universitas Pasundan, Bandung.
- Arif, M. D. (2018). Analisa Perjalanan Dinas Terhadap Kinerja Proyek Ppgj Pada Pt Inti Karya Persada Teknik (Ikpt). *Ratih: Jurnal Rekayasa Teknologi Industri Hijau*, 1(2), 7.

- Astiti, N. P. (2020). Pemangkasan anggaran karena imbas covid 19. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 5(2), 63-70.
- Kojongian, C., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13 (03).
- Muliyana, M. (2021). *Sistem informasi manajemen dan monitoring perjalanan dinas pada perwakilan bkkbn provinsi kalimantan selatan* (doctoral dissertation, universitas islam kalimantan mab).
- Novianta, N. (2021). *Implementasi penyusunan anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah melalui aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) pada kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah kota jambi* (doctoral dissertation, d3 akuntansi).
- Nurfarida, Y. H. A. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Biaya Perjalanan Dinas.
- Pasaribu, M. A., & Fadhly, Z. (2021). Perancangan Aplikasi dalam Pengelolaan Surat Perjalanan Dinas di BPKD Aceh Barat. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1 (8), 419-425.
- Puspitasari, N. E. (2021). Rancang bangun sistem informasi surat perintah perjalanan dinas di dinas koperasi dan usaha mikro lamongan. *Misi: Jurnal Manajemen Informatika & Sistem Informasi*, 4 (2), 2-9.
- Sari, M. P. P., Wulandari, P. A., & Bahit, M. (2021, September). Perancangan Sistem Informasi Perhitungan Perjalanan Dinas pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Berbasis Web. In *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* (Vol. 6, No. 1, pp. 780-785).
- Rachmawati, S., Retnasari, T., & Sunarto, S. (2018). Optimalisasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Perusahaan. *Jurnal Teknologi Dan Ilmu Komputer Prima (JUTIKOMP)*, 1(2), 241-249.
- Robyanto, D., Priyatna, A. P., Hermaliani, E. H., Friyadie, F., & Gata, W. (2021). Implementasi Deterministic Finite Automata (DFA) Pada Perancangan Aplikasi Perhitungan Uang Harian Perjalanan Dinas Kementerian. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 9(02), 100-104.
- Rusdi, A. Akuntabilitas Pemerintah Dalam Penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (Sppd) Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Bulukumba.
- Soesanto, S., & Haryanto, H. (2021). Analisis sistem akuntansi pengelolaan uang perjalanan dinas di inspektorat iv itjen kemendikbudristek RI. *Remittance: jurnal akuntansi keuangan dan perbankan*, 2 (2), 25-37.
- Suharnoko, D. (2019). Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Malang. *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan dan Inovasi*, 1(2), 1-13.
- Sularto, L. (2013). Sistem informasi akuntansi.
- Susanto, A. M. A. Jelaskan definisi Sistem Informasi Akuntansi menurut 3 para ahli.
- Zamzami, F., Nusa, N. D., & Faiz, I. A. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. UGM PRESS